



PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050 / KEP.544 / 2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantera Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pembahasan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2013 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 - 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu Keputusan Bupati ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Rencana Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Inspektorat Kabupaten Kerinci wajib :
a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Tahun 2019.

Ditetapkan di Sungaipenuh
pada tanggal, 31 Desember 2014

BUPATI KERINCI



H. ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci;
4. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
5. Sdr. Kabag Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksemplar); dan
6. Arsip.

Lampiran I Keputusan Bupati
Nomor : 050 / KEP. 544 / 2014
Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**
2 Tugas :
3 Fungsi :
4 Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
1	Meningkatnya rasio kemandirian daerah	Rasio kemandirian daerah (Persen)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, DPPKA
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (Persen / ADHK)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, DPPKA
3	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp)	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Dinas PU, Distan TP, Disnakan, Disporaparbud, Diskop dan UMKM, BP4K, BKP, Dishutbun, BPMPTSP, Disperindag dan ESDM
4	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB (Persen)	Disperindag dan ESDM, Diskop dan UMKM
5	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	Dinsosnakertrans
6	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	Disporaparbud
7	Meningkatnya angka melek huruf	Angka Melek Huruf (Persen)	Disdik
8	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	
9	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Angka partisipasi kasar PAUD usia 3-6 tahun (Persen)	
		Angka partisipasi sekolah SD/MI usia 7-12 tahun (Persen)	
10	Meningkatnya angka harapan hidup	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Dinkes, RSUD, Disporaparbud
11	Menurunnya angka kematian bayi	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	
12	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 1000 Kelahiran Hidup	
13	Menurunnya jumlah balita gizi buruk	Persentase balita gizi buruk	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum Dinsosnakertrans, BPBD, BPMPPPP dan KB, Kecamatan
14	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase masyarakat miskin	
15	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik	Dinas PU, Dishubkominfo
16	Meningkatnya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi	Rasio layanan irigasi (Persen)	Dinas PU
17	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	
18	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Kualitas Air Permukaan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa Persentase pengelolaan sampah	BLHD, Dishutbun, Disperindag dan ESDM
19	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Bappeda
20	Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Asisten Pemerintahan Umum, Asisten Adm. Umum, Bappeda, Inspektorat, DPPKA
21		Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Asisten Pemerintahan, Asisten Adm. Umum, Kecamatan, RSUD, BPMPTSP, Disdukcapil, BKD, BPMPPPP dan KB, Bakesbangpol, Satpol-PP, Sek DPRD, Kantor Perpustakaan dan Arsip

Sungai Penuh, 31 Desember 2014
 BUPATI KERINCI


 H. ADIROZAL

Lampiran II Keputusan Bupati
Nomor : 050/Kep.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **DINAS PENDIDIKAN**
- 2 Tugas : Pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendidikan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya
- 3 Fungsi :
- 1 pengelolaan Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi, Non Formal dan Informal
 - 2 penyusunan strategi kebijakan peningkatan mutu pendidikan
 - 3 pemberian pertimbangan kepada Bupati dalam pemerataan penempatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 4 penyebarluasan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dalam menyelenggarakan pendidikan
 - 5 penyusunan rencana pengembangan lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta
 - 6 pengumpulan dan pengelolaan data yang berhubungan dengan lembaga pendidikan
 - 7 pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga di bidang pengembangan pendidikan
 - 8 peningkatan sumber daya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
 - 9 pemberian usulan calon kepala sekolah, calon pejabat fungsional dan calon pejabat struktural untuk lingkup Dinas Pendidikan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk dipertimbangkan oleh Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
 - 10 pemberian rekomendasi siswa yang berprestasi ke Lembaga Sekolah dan/atau Lembaga Pendidikan terkemuka
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatnya angka melek huruf	Angka melek huruf	Laporan hasil evaluasi dan pelaporan
2	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	Laporan hasil evaluasi dan pelaporan
3	Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS)	AngkaPartisipasi Sekolah (APS)	Laporan hasil evaluasi dan pelaporan
		APS 7-12	
		APS 13-15	
		APS 16-18	
4	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK)	Angka partisipasi kasar (APK)	Laporan hasil evaluasi dan pelaporan
		APK SD/MI	
		APK SMP/MTs	
		APK SMA/SMK/MA	
5	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Murni (APM)\	Laporan hasil evaluasi dan pelaporan
		APM SD/MI	
		APM SMP/MTs	
		APM SMA/SMK/MA	
6	Menurunnya Angka Putus Sekolah	Angka Putus Sekolah	Laporan hasil evaluasi dan pelaporan
7	Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Laporan hasil evaluasi dan pelaporan
8	Meningkatnya Angka Kelulusan (AL)	Angka Kelulusan (AL)	Laporan hasil evaluasi dan pelaporan
		AL SD/MI	
		AL SMP/MTs	
		AL SMA/SMK/MA	
9	Meningkatnya kualifikasi tenaga pendidik	Persentase Guru PNS Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Laporan hasil evaluasi dan pelaporan
		Persentase Guru PNS yang Mendapatkan Sertifikat Pendidik	
10	Meningkatnya jumlah sekolah dengan kondisi baik	Presentase Gedung Sekolah SD Kondisi Baik	Laporan hasil evaluasi dan pelaporan
		Presentase Gedung Sekolah SMP Kondisi Baik	
		Presentase Gedung Sekolah SMA/SMK Kondisi Baik	

**Lampiran III Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **DINAS KESEHATAN**
- 2 Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kewenangan desentralisasi dan kewenangan dekosentrasi di bidang kesehatan
- 3 Fungsi :
 1 Melaksanakan pembinaan umum di bidang teknis kesehatan yang meliputi peningkatan (promotif), pencegahan (proventif), penyembuhan (kruatif), pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 2 Melaksanakan pembinaan teknis dalam upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan berdasarkan kebijakanteknis yang ditetapkan oleh pemerintah;
 3 Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 4 Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas; dan
 5 Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas kesehatan
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, lintas sektor, institusi swasta, organisasi profesi dan dunia usaha dalam rangka sinergisme, koordinasi antara pelaku pembangunan guna mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.	Usia harapan hidup (UHH) Angka kematian Ibu (AKI) Melahirkan (per 1000 kelahiran hidup) Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (MDGs) Menaikan Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu Poned Persentase Rumah Sakit mampu Ponek Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup (MDGs) Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah Angka Kematian anak belita (AKABA) Per 1000 kelahiran hidup (MDGs) Cakupan kunjungan ibu hamil K4/cakupan pelayanan antenatal (K4) (SPM/MDGs) Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (SPM) Rasio Posyandu per satuan belita	Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
2	Mewujudkan komitmen pembangunan kesehatan melalui peningkatan advokasi kesehatan kepada stakeholder.	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (penemuan pasien baru TB BTA positif) (SPM) Prevalensi Malaria per 1000 penduduk (MDGs) Cakupan Penemuan dan penanganan kelompok penderita dan kelompok komunitas beresiko HIV/AIDS Prevalensi HIV/AIDS Cakupan imunisasi lengkap pada bayi Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM/MDGs) Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani (SPM) Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk (MDGs) Angka kematian DBD (%) (MDGs) Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (MDGs) Angka Kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/ 100.000 penduduk/tahun) (MDGa) Tingkat Prevalensi tuberkulosis (per 100.000) penduduk/tahun) (MDGs) Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (MDGs) Proporsi Jumlah Kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) (MDGs) Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate) (MDGs) Persentase kepuasan pelanggan terhadap tingkat pelayanan Rumah Sakit (SPM) Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan PHBS Persentase Sekolah yang ber PHBS Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
3	Mendorong pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan sesuai standar pelayanan minimal.	Cakupan Desa/Kelurahan siaga aktif (SPM)(MDGs) Persentase Posyandu aktif Persentase belita gizi kurang Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif Presentasa belita gizi kurang Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (SPM) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan/Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (SPM/MDGs) Cakupan pelayanan nifas (SPM) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (SPM) Cakupan kunjungan bayi (SPM) Cakupan pelayanan anak belita (SPM) Cakupan peserta KB aktif (SPM) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten (SPM) Cakupan pemberian makan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan keluarga miskin (SPM) Cakupan belita gizi buruk mendapat perawatan (SPM)MDGs) Cakupan penemuan dan penanganan acute flacid paralysis rate per 100.000 penduduk <15 tahun (SPM) Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia belita (SPM) Cakupan penemuan dan penanganan penderiat diare (SPM) Cakupan puskesmas/ desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Cakupan pelayan kesehatan dasar masyarakat miskin/keluarga miskin (SPM) Cakupan pelayan kesehatan rujukan pasiaen masyarakat miskin (SPM)	Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci
4	Menetapkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan disemua jenjang administrasi melalui pengembangan kebijakan, System informasi, keterpaduan dalam perencanaan, penatalaksanaan dan evaluasi serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menanggulangi masalah kesehatan	Cakupan Puskesmas Cakupan Puskesmas pembantu Rasio puskesmas, piliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio rumah sakit persatuan penduduk Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi nimuman (MDGs) Proporsi penduduk yang teinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral (MDGs) Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun (MDGs) Rasio tenaga dokter umum per satuan penduduk' Rasio tenaga dokter gigi persatuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rasio tenaga perawat per satuan penduduk Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk Persentase PTM pada pendudul	Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
5	Mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang ada melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM kesehatan	Persentase puskesmas dalam penganggaran SPM Persentase Penganggaran kesehatan terhadap APBD Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (MDGAS) Jumlah sarana rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (MDGs) Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak (jamban sehat) (MDGs)	Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci

Lampiran V Keputusan Bupati

Nomor : 050/KEP.544/2014

Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **DINAS PEKERJAAN UMUM**
- 2 Tugas : Menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pekerjaan umum dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan/limpahkan kepada daerah
- 3 Fungsi :
 1 Pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan bidang pengendalian dan pendayagunaan sarana prasarana;
 2 Pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan dibidang cipta karya;
 3 Pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan dibidang bina marga;
 4 Pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan dibidang sumber daya air;
 5 Pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan dibidang pengendalian tata ruang;
 6 Pembinaan terhadap UPTD yang meliputi kegiatan workshop, stone crusher, AMP dan laboratorium teknik; dan
 7 Pembinaan terhadap UPT wilayah.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Tersedianya sarana dan prasarana pada dinas pekerjaan umum serta terlaksananya pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat	Rasio jalan kabupaten dalam kondisi baik	Inventarisasi dan penanganan jalan kabupaten (K1)
		Rasio jembatan dalam kondisi baik	Inventarisasi dan penanganan jembatan kabupaten (K10)
		Rasi jaringan irigasi kondisi baik	Data perkembangan irigasi setiap tahun
		Panjang jalan lingkungan	Database jalan lingkungan
		Persentase rumah tangga bersanitasi	Data buku putih PPSP
		Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Indentitas data akurat rispam
		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Air Minum Terlindungi (Ledeng/Keran	Indentitas data akurat rispam
		Persentase peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik	Kartu Inventaris barang dinas PU
		Persentase desa yang memiliki akses air bersih berpipaan	Indentitas data akurat rispam
		Cakupan pemeliharaan infrastruktur wilayah	Laporan tahunan dinas PU

Lampiran VI Keputusan Bupati

Nomor : 050/KEP.544/2014

Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
- 2 Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan, penanaman modal, penilaian, penelitian/kajian atas pelaksanaan maupun sebelum pelaksanaan
- 3 Fungsi :
- 1 Menyusun Rancangan Pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah;
 - 2 Mengembangkan sistem perencanaan sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun rancangan kerja dan anggaran satuan perangkat daerah;
 - 3 Melaksanakan koordinasi dan atau mengkoordinir penelitian untuk kebutuhan pembangunan daerah;
 - 4 Mengembangkan dan menerapkan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan;
 - 5 Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan monitoring, penegndalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah;
 - 6 Melaksanakan koordinasi pembangunan bidang ekonomi dan menanamkan modal;
 - 7 Melaksanakan koordinasi sosial budaya;
 - 8 Melaksanakan koordinasi fisik dan prasarana dibidang tata ruang, pemukiman dan sumber daya alam; dan
 - 9 Mengkoordinir dan menghimpun data statistik.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBD	Laporan Hasil Evaluasi
2	Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	Ketersediaan buku daerah dalam angka	BPS Kabupaten Kerinci
3	Meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Laporan Hasil Evaluasi
4	Teregulasinya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Laporan Hasil Evaluasi
		Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Laporan Hasil Evaluasi
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Laporan Hasil Evaluasi
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Laporan Hasil Evaluasi
5	Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah	Penyampaian dokumen LKPJ Tahunan Tepat Waktu	Laporan Hasil Evaluasi
6	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Laporan Hasil Evaluasi

**Lampiran VII Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
- 2 Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi daerahkabupaten dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam bidang perhubungan komunikasi informatika kabupaten kerinci
- 3 Fungsi :
- 1 Sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan, perumusan kebijakan teknis dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 2 bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang perhubungan dan kominfo
 - 3 bimbingan teknis pelaksanaan program struktural bidang perhubungan dan kominfo
 - 4 evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perhubungan dan kominfo
 - 5 melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam upaya promosi dan informasi dibidang perhubungan dan kominfo
 - 6 melaksanakan hubungan kerjasama dengan dinas terkait serta dengan organda
 - 7 bimbingan dan pengendalian pelaksanaan telekomunikasi dan informatika
 - 8 melaksanakan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat postel
 - 9 pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga dinas perhubungan komunikasi dan informatika
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan perhubungan Kabupaten Kerinci	persentase jumlah petugas terhadap jumlah pasar pekan jumlah kendaraan yang melakukan PKB	Bidang ML
2	Meningkatkan SDM Perhubungan dan Kominfo	jumlah pegawai yang mempunyai kemampuan teknis perhubungan dan kominfo	Bidang Sekretariat
3	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dan kominfo	jumlah sarana perhubungan tersedia jumlah perlengkapan jalan tersedia	Bidang Sarana
4	Meningkatnya pengawasan dan pendataan telekomunikasi dan informatika	persentase jumlah tower yang memenuhi ketentuan peraturan jumlah tower yang diawasi	Bidang Postel

**Lampiran VIII Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan penyeimbangan distribusi, penganeekaragaman konsumsi dan kewaspadaan pangan daerah.
- 3 Fungsi :
- 1 Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kebersihan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrument ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan kebersihan;
 - 2 Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan dan kebersihan pertamanan;
 - 3 Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
 - 4 Melakukan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan;
 - 5 Melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dan kebersihan/pertamanan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
 - 6 Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
 - 7 Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan pengingkatan keterpaduan dalam perencanaan pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 8 Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan/pertamanan;
 - 9 Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup daerah; dan
 - 10 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan hidup daerah.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Terkendalnya dampak perubahan Iklim	Penurunan emisi gas rumah kaca	BLHD
2	Meningkatnya Jumlah Wilayah/Desa menjadi kampung Iklim	Jumlah wilayah/desa yang memenuhi kriteria kampung	BLHD
3	Meningkatnya pengelolaan wilayah sub DAS dan kawasan berfungsi lindung serta pelestarian potensi kehati	Jumlah penanaman pohon untuk konservasi	BLHD
4	Terkendalnya tingkat kerusakan dan pencemaran sesuai dengan standar baku mutu lingkungan	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pemantauan dan pengawasan Pengujian Kualitas Air Pengujian Kualitas Tanah Pengujian Kualitas Udara Jumlah Kelompok/ masyarakat yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	BLHD
5	Terlaksananya pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas	Persentase pengelolaan sampah Jumlah tempat penampungan sementara (TPS) yang tersedia	BLHD
6	Terlaksananya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah luas ruang terbuka hijau (RTH) yang dikelola	BLHD
7	Tersedianya data dan Informasi Lingkungan Hidup Kab Kerinci	Jumlah Jenis dokumen lingkungan hidup kabupaten	BLHD

Lampiran IX Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
- 2 Tugas : Melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3 Fungsi :
 1 Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil;
 2 Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Masyarakat dapat memperoleh dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil dengan mudah, murah dan tepat (One Day Service) serta memahami manfaatnya	Ketersediaan database kependudukan	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
2	Pencapaian tertib dokumen administrasi kependudukan menuju kerinci yang lebih baik	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
3	Setiap penduduk tercatat dan terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
4	Tersedianya database kependudukan dan pencatatan sipil	Pencetakan KK	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
5	Mencegah penyalahgunaan dan kepemilikan dokumen ganda	Pencetakan KTP-el	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
		Rata-rata waktu pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan

Lampiran X Keputusan Bupati

Nomor : 050/KEP.544/2014

Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**
- 2 Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- 3 Fungsi :
 1 Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 2 Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 3 Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan (Home Industri)	Persentase Partisipasi perempuan dalam pembangunan	Bidang PP
2	Terbinanya kelompok PKK Kecamatan desa dalam kab. kerinci	Persentase PKK Aktif Rata-rata jumlah kelompok bina PKK	Bidang PP Bidang PP
3	Meningkatnya kesejahteraan gender dan kualitas perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	Bidang PP
4	Tercapainya pelayanan KB, alat Kontrasepsi, kesehatan reproduksi serta membangun keluarga sehat sejahtera	Cakupan peserta KB aktif Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Bidang KB/KS Bidang KB/KS
5	Kelompok KB PUS yang belum Ber-KB	Persentase peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur	Bidang KB/KS
6	Peserta KB Aktif	Rasio akseptor KB	Bidang KB/KS
7	Meningkatkan pelayanan KB bagi keluarga miskin dan penyuluhan tentang KB di Tk Kec. Dalam kab. Kerinci	Rata-rata jumlah anak per keluarga Proporsi wanita 15-49 tahun berstatus kawin yang menggunakan alat KB	Bidang KB/KS Bidang KB/KS
8	Terciptanya kelompok TTG sehingga bisa menambah penghasilan	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Bidang Sosbud
9	Kelompok POSYANTEK dalam Kab. Kerinci	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi	Bidang Sosbud
10	Aparatur pemerintah desa dalam Kab. Kerinci	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Penyediaan Alokasi Dana Desa	Bidang Pemdes Bidang Pemdes

**Lampiran XI Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
- 2 Tugas : 1 Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- 2 Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- 3 Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
- 4 Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana
- 5 Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kepada Buapti Kerinci setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- 6 Mengendalikan pengumpulan dan penyusunan uang dan barang
- 7 Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- 8 Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- 3 Fungsi : 1 Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- 2 Pelaksanaan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- 3 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 4 Indikator Kinerja Utama : 1 Jumlah Lokasi Dasa Tangguh Bencana
- 2 Persentase Petugas yang Terlatih
- 3 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
- 4 Persentase Pelayanan Penanganan Bencana
- 5 Laporan Investarisasi kerusakan pasca bencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah lokasi desa tangguh bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan penanggulangan bencana	Persentase petugas yang terlatih	UPTB Damkar/Bidang Kedaruratan dan Logistik
3	Meningkatnya Koordinasi penanganan pasca bencana dengan instansi terkait baik tingkat daerah, provinsi dan pusat	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	UPTB Damkar
		Persentase Pelayanan Penanganan Bencana	Bidang Kedaruratan dan Logistik/UPTB Damkar
		Laporan Investarisasi kerusakan pasca bencana	Bidang rehabilitasi dan Rekonstruksi

Lampiran XII Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
- 2 Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 3 Fungsi :
 1 Melaksanakan kebijakan dibidang penempatan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 2 Melaksanakan kebijakan dibidang penempatan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 3 Melaksanakan kebijakan di bidang hubungan industrial, syarat kerja dan pengawasan ketengakerjaan;
 4 Melaksanakan kebijakan di bidang transmigrasi;
 5 Melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
 6 Pembinaan dan pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Latihan Kerja (UPTD-LLK); dan
 7 Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Terlayannya penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan hidup	Sarana sosial seperti LKS dan ORSOS	Bidang Kesbansos dan bidang pelresos
2	Meningkatnya upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Bidang Kesbansos dan bidang pelresos
3	Tercapainya kemandirian bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Bidang Pelresos
4	Tersedianya data tentang masalah sosial masyarakat, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasi yang <i>Up to date</i>	Tingkat pengangguran terbuka	Bidang Ketenagakerjaan dan pengawasan tenaga kerja
5	Tersedianya tenaga terampil	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	UPTD LLK Kab. Kerinci
6	Terlaksananya fungsi pengawasan secara optimal	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	Bidang Ketenagakerjaan dan pengawasan tenaga kerja
7	Peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi dan masyarakat sekitar	Jumlah bina warga transmigrasi	Bidang Transmigrasi

**Lampiran XIII Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **DINAS KOPERASI DAN UMKM**
- 2 Tugas : Melaksanakan Kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah
- 3 Fungsi :
- 1 Sinkronisasi penyusunan rencana program pembangunan, perumusan kebijakan teknis dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2 Bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan bidang Koperasi dan UMKM;
 - 3 Bimbingan Teknis Pelaksana Program Struktural Bidang Koperasi dan UMKM;
 - 4 Evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan koperasi dan UMKM;
 - 5 Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam upaya promosi dan informasi di bidang koperasi dan UMKM;
 - 6 Melaksanakan hubungan kerjasama dengan dinas terkait serta organisasi dan asosiasi dunia usaha;
 - 7 Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan dan pendaftaran badan hukum koperasi;
 - 8 Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan koperasi dan UMKM; dan
 - 9 Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas Koperasi dan UMKM.

4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Kabupaten Kerinci	Persentase Koperasi aktif	Dinas Koperasi dan UMKM
2	Meningkatnya jumlah wirausaha baru di kabupaten kerinci	Jumlah UMKM (wira usaha baru)	Dinas Koperasi dan UMKM
3	Bertambahnya jumlah produk unggulan daerah	Jumlah Produk Unggulan Daerah	Dinas Koperasi dan UMKM
4	Meningkatnya kualitas SDM Pengelola koperasi dan UMKM Kabupaten Kerinci	Jumlah SDM UMKM yang terlatih	Dinas Koperasi dan UMKM

- 1 Nama Organisasi : **BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
 2 Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
 3 Fungsi :
 1 Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 2 Penyelenggaraan urusan penanaman modal, pelayanan perizinan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor investasi terutama sektor investasi pariwisata yang memiliki keunggulan kooperatif dan kompetitif serta meningkatkan tertip pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah Investor/ perusahaan (PMDN/PMA)	BPMPP-TSP
2	Meningkatnya tertib pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-rata lama proses perizinan	BPMPP-TSP
3	Mewujudkan fasilitas sarana investasi yang kondusif bagi para investor	Ketersediaan sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	BPMPP-TSP

Lampiran XV Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**
- 2 Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan untuk menyelenggarakan rumah tangganya.
- 3 Fungsi :
- 1 Perumusan kebijakan teknis dibidang pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
 - 2 Melaksanakan kebijakan operasional pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian pelaksanaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3 Menyusun rencana kegiatan jangka panjang dan jangka pendek sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan;
 - 4 Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang peningkatan dan perkembangan pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
 - 5 Melaporkan perkembangan dibidang pemoda, olahraga, parieisata dan kebudayaan serta kegiatan dinas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 - 6 Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga di bidang pengembangan keolahragaan, pariwisata dan kebudayaan; dan
 - 7 Merekomendasikan ke lembaga keolahragaan atau lembaga lainnya bagi yang berprestasi;
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah gedung olahraga Jumlah lapangan olahraga Jumlah kegiatan olahraga	Hasil monitoring Bidang olahraga
2	Meningkatkan peran serta kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah organisasi pemuda	Hasil monitoring Bidang Pemuda
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisata	Hasil monitoring Bidang Pariwisata
4	Terdatanya benda cagar budaya	Jumlah Group kesenian Persentase benda cagar budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Hasil monitoring Bidang Kebudayaan dan pariwisata

**Lampiran XLVI Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **BADAN KETAHANAN PANGAN**
- 2 Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan penyeimbangan distribusi, penganekaragaman konsumsi dan kewaspadaan pangan daerah
- 3 Fungsi :
 1. pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan
 2. pengkajian terhadap penyediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan harga pangan serta konsumsi dan keamanan pangan
 3. pengaturan dan pelaksanaan pemantauan penyediaan pangan, distribusi dan harga pangan strategis
 4. pengaturan pelaksanaan dan pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan
 5. pengendalian mutu dan keamanan pangan
 6. penyiapan bahan koordinasi penyediaan kerawanan pangan, distribusi harga serta konsumsi keamanan pangan
 7. pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan daerah
 8. melaksanakan kerja sama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait dalam pengembangan ketahanan pangan
 9. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, perencanaan, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan sesuai dengan lingkup tugasnya
 10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam	Skor PPH Ketersediaan	Badan Ketahanan Pangan
2	Penurunan Jumlah Penduduk rawan pangan	Penurunan jumlah penduduk rawan pangan (%/thn)	Badan Ketahanan Pangan
3	Stabilitas Harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen	Harga gabah kering panen (GKP) ditingkat konsumen (CV)	Badan Ketahanan Pangan
		Koefisien variasi pangan (beras) ditingkat konsumen (CV)	Badan Ketahanan Pangan
4	Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/hr)	Badan Ketahanan Pangan
		Konsumsi protein (Gram/Kap/hr)	Badan Ketahanan Pangan
		Skor PPH Konsumsi	Badan Ketahanan Pangan
5	Peningkatan Pangan segar yang aman dan bermutu	Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi (%)	Badan Ketahanan Pangan
		Tingkat keamanan pangan segar yang diuji(%)	

Lampiran XVI Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
- 2 Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 3 Fungsi :
- 1 Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, kewaspadaan dan penanganan konflik, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta pembinaan budaya politik dalam negeri;
 - 2 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, kewaspadaan dan penanganan konflik, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta pembinaan budaya politik dalam negeri;
 - 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, kewaspadaan dan penanganan konflik, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta pembinaan budaya politik dalam negeri;
 - 4 Pembinaan dan fasilitasi di bidang kesatuan bangsa, kewaspadaan dan penanganan konflik, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta pembinaan budaya politik dalam negeri;
 - 5 Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa, kewaspadaan dan penanganan konflik, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta pembinaan budaya politik dalam negeri; dan
 - 6 Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, kewaspadaan dan penanganan konflik, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta pembinaan budaya politik dalam negeri.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kewaspadaan nasional didaerah	Persentase penurunan konflik sosila masyarakat Persentase jumlah demo masyarakat yangtertip	Bidang Kewaspadaan Nasional
2	Meningkatkan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan	Jumlah LSM atau Ormas yang memenuhi syarat (legal)	Bidang Ket.Seni Bud, Agama, Kemasy dan Ekonomi
3	Meningkatkan pembinaan politik dalam negeri	Jumlah Partai politik yang telah memenuhi ketentuan Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	Bidang Politik

**Lampiran XVII Keputusan Bupati
 Nomor : 050/KEP.544/2014
 Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
 2 Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan ketentraman masyarakat.
 3 Fungsi :
 1 Penyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan penyelenggara ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 2 Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; dan
 3 Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparaturnya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
		Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang terlatih	SATPOL-PP
		Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	
		Persentase polisi pamong praja yang terlatih	
		Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	
		Cakupan patroli petugas Pol-PP	
		Persentase penyelesaian penegakan PERDA	
		Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan) di kab. Kerinci	
		Rasio Poskamling per dasa/kelurahan	

Lampiran XVIII Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **SEKRETARIAT DAERAH**
- 2 Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.
- 3 Fungsi :
 1 Pengorganisasian perumusan kebijakan pemerintah daerah;
 2 Pengorganisasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah;
 3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 4 Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi serta aparatur pemerintah daerah; dan
 5 Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja dan laporan keuangan yang tersedia	Laporan hasil evaluasi dan pelaporan
2	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan menyusun standar satuan harga barang/jasa pemerintah daerah kabupaten kerinci dan renja setda kerinci	Ketersediaan Renstra, Renja, PK, dan standar satuan harga barang/jasa pemerintah	Hasil penyusunan dokumen dan pembahasan dokumen
3	Terwujudnya penataan peraturan perundang-undangan baik peraturan yang dikeluarkan daerah maupun pusat	Persentase keserasian produk hukum daerah dengan dengan produk hukum yang lebih tinggi	Hasil pembahasan peraturan
4	Terwujudnya penataan daerah otonomi baru	Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi dan proses pemekaran kabupaten kerinci	Hasil koordinasi dan langkah-langkah proses pemekaran kabupaten kerinci
5	Terwujudnya sisitem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase kasus pengaduan yang ditangani	Bagian hukum setda kerinci
6	Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan gaji serta pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Ketersediaan web Pemerintah Daerah	Tersedianya web pemerintah daerah oleh bagian PDE
7	Terwujudnya pengendalian bidang perekonomian dan pembangunan	Jumlah koordinasi dan pengendalian bidang perekonomian dan pembangunan serta jumlah lelang yang ditangani	Laporan hasil evaluasi dan pelaporan
8	Terwujudnya pengendalian sumber daya alam dan pembinaan penggunaan DBH CHT	Jumlah pembinaan, koordinasi dan monitoring serta evaluasi bidang SDAdan penggunaan DBH CHT	Hasil pembinaan dan koordinasi
9	Tertatanya dan tersedianya dokumen arsip produk hukum daerah dan arsip lainnya	Jumlah dokumen /arsip yang ditata	Arsip di bagian hukum dan bagian umum
10	Terwujudnya pembinaan sosial terhadap masyarakat	Jumlah pembinaan dan koordinasi sosial kemasyarakatan	Jumlah kegiatan bagian kesra
11	Terwujudnya pelayanan informasi pemerintah daerah	Ketersediann informasi pembangunan daerah	Bagian humas dan protokol dan bagian PDE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
12	Terwujudnya tata pemerintahan secara profesional dan proporsional	Ketersedian dokumen untuk penataan kembali organisasi pemerintah daerah	Bagian organisasi setda kerinci
13	terwujudnya pelayanan prima terhadap SKPD dan masyarakat	Ketersedian laporan, SOP, serta terbentuknya pelayanan terpadu kecamatan	Bagian organisasi setda kerinci
14	Terwujudnya masyarakat yang beriman bertaqwa kepada tuhan YME	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Bagian organisasi setda kerinci

Lampiran XIX Keputusan Bupati

Nomor : 050/KEP.544/2014

Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- 2 Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 3 Fungsi :
 1 Memfasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
 2 Menyampaikan bahan pertimbangan kepada DPRD dalam pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 3 Melaksanakan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Kerinci;
 4 Mengelola tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian (tenaga ahli), mengelola keuangan dan perbekalan DPRD;
 5 Membina ketertiban serta keamanan dalam acara-acara persidangan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Tetibnya administrasi perkantoran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Persentase terpenuhinya pakaian dinas DPRD Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Jumlah SDM aparatur yang profesional Persentase terhimpunnya hasil rapat/hasil keputusan DPRD dan Kegiatan DPRD Persentase tersebarnya informasi kegiatan DPRD kepada Masyarakat Persentase terpenuhinya kegiatan dan dokumentasi pelantikan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kerinci	Renstra DPRD Kab Kerinci Tahun 2014-2019

Lampiran XX Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**
 2 Tugas : Melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
 3 Fungsi :
 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
 2 Penyelenggaraan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 3 pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas pengelola anggaran yang sesuai dengan perundang-undangan	Ketepatan waktu penyampaian PERDA APBD Ketepatan waktu penyampaian PERDA Perubahan APBD	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
2	Menertibkan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang profesional, akuntabel dan transparan	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah Persentase SKPD yang menyusun Laporan Keuangan Ketersediaan regulasi pengelolaan keuangan daerah Persentase permasalahan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi yang terselesaikan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
3	Menertipkan dan meningkatkan administrasi pendapatan dari sektor pendapatan asli daerah	Peningkatan PAD (Pajak dan Retribusi Daerah)	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan Laporan realisasi PAD
4	Menertipkan dan meningkatkan administrasi dan aset daerah	Total Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi) Persentase penyelesaian inventarisasi BMD Persentase aset tanah PEMDA yang memiliki dokumen sertifikat	Laporan Realisasi PAD, Hasil pelaksanaan kegiatan dan database aset
5	Menertipkan data dan laporan DAK bidang Infrastruktur	Ketepatan waktu menyampaikan laporan penyerapan DAK bidang infrastruktur WBRSDAK	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan

Lampiran XXI Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
- 2 Tugas : Membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah meliputi pengelolaan dan pembinaan kepegawaian daerah sesuai dengan kepegawaian yang dimiliki oleh daerah
- 3 Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pembinaan kepegawaian daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah
 2. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan dan pembinaan kepegawaian daerah yang meliputi perencanaan pengadaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian daerah
 3. Melakukan pelayanan teknis administrasi dan fungsional
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kepuasan Pegawai terhadap Penyelenggaraan Fungsional BKD Kabupaten Kerinci	Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat	Sekretariat
2.	Meningkatnya pejabat struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan	Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang sudah mengikuti kepemimpinan	Bidang Diklat
3.	Meningkatkan pegawai yang mendapatkan pelayanan Kenaikan Pangkat secara tepat waktu	Persentase PNS yang mendapat pelayanan kenaikan pangkat secara tepat waktu	Bidang PKMP
4	Meningkatkan pegawai yang mendapatkan pelayanan Kenaikan gaji berkala secara tepat waktu	Persentase PNS yang mendapat pelayanan kenaikan gaji berkala tepat secara tepat waktu	Bidang PKMP
5	Meningkatkan tingkat Disiplin PNS	Jumlah PNS yang mendapat hukuman Disiplin dan Pemberhentian	Bidang Disiplin
6	Tersedianya sistem informasi kepegawaian	Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian	Bidang PP

**Lampiran XXII Keputusan Bupati
 Nomor : 050/KEP.544/2014
 Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **INSPEKTORAT**
 2 Tugas : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.
 3 Fungsi :
 1 Perencanaan program pengawasan;
 2 Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 3 Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas.
 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	Persentase Capaian Kinerja SKPD sesuai Tupoksi serta penetapan kinerjanya Persentase SAKIP kategori baik	INSPEKTORAT
2	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan	
3	Penanganan Pengaduan Masyarakat dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah aduan/laporan masyarakat yang mesti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kasus	

**Lampiran XXIII Keputusan Bupati
 Nomor : 050/KEP.544/2014
 Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN GUNUNG TUJUH**
 2 Tugas : Kecamatan Gunung Tujuh melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.
 3 Fungsi :
 1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
 2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
 3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi terhadap Masyarakat	Persentase Jumlah Pelayanan Sesuai Standar	Renstra Kecamatan
2	Menciptakan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	Kantor Kepala Desa yang Aktif	Renstra Kecamatan

Lampiran XXV Keputusan Bupati**Nomor : 050/KEP.544/2014****Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN KAYU ARO BARAT**
- 2 Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 3 Fungsi :
1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi Terhadap Masyarakat	Persentase Jumlah Pelayanan Sesuai Standar	Renstra Kecamatan
2	Menciptakan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	Kantor Kepala Desa yang aktif	Renstra Kecamatan
3	Percepatan pengentasan Kemiskinan	Tersedianya Rumah Layak Huni dan Alsintan	Renstra Kecamatan

**Lampiran XXIV Keputusan Bupati
 Nomor : 050/KEP.544/2014
 Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN KAYU ARO**
 2 Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
 3 Fungsi :
 1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
 2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
 3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi Terhadap Masyarakat	Persentase Jumlah Pelayanan Sesuai Standar	Renstra Kecamatan
2	Menciptakan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	Kantor Kepala Desa yang aktif	Renstra Kecamatan

**Lampiran XXVI Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN GUNUNG KERINCI**
- 2 Tugas : Kecamatan Gunung Kerinci melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.
- 3 Fungsi :
 1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
 2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
 3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi Terhadap Masyarakat	Persentase Jumlah Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Gunung Kerinci
2	Menciptakan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	Kantor Kepala Desa yang Aktif	Kecamatan Gunung Kerinci

Lampiran XXVII Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN SIULAK**
- 2 Tugas : Kecamatan Siulak melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.
- 3 Fungsi :
 1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
 2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
 3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Jumlah Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Siulak
2	Menciptakan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	Kantor Kepala Desa yang Aktif	Kecamatan Siulak

**Lampiran XXVIII Keputusan Bupati
 Nomor : 050/KEP.544/2014
 Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN SIULAK MUKAI**
 2 Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
 3 Fungsi :
 1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
 2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
 3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi Terhadap Masyarakat	Persentase Jumlah Pelayanan Sesuai Standar	Renstra Kecamatan
2	Menciptakan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	Kantor Kepala Desa yang Aktif	Renstra Kecamatan

**Lampiran XXIX Keputusan Bupati
 Nomor : 050/KEP.544/2014
 Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN AIR HANGAT**
 2 Tugas : Kecamatan Air Hangat melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.
 3 Fungsi :
 1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
 2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
 3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi	Persentase Jumlah Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Air Hangat
2	Menciptakan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	Kantor Kepala Desa yang Aktif	Kecamatan Air Hangat

Lampiran XXX Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR**
- 2 Tugas : Kecamatan Air Hangat Timur melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.
- 3 Fungsi :
 1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
 2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
 3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Pelayanan Terhadap Masyarakat	Persentase Jumlah Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Air Hangat Timur
2	Menciptakan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	Kantor Kepala Desa yang Aktif	Kecamatan Air Hangat Timur

**Lampiran XXXI Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN AIR HANGAT BARAT**
- 2 Tugas : Kecamatan Air Hangat Barat melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.
- 3 Fungsi :
 1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
 2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
 3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi Terhadap Masyarakat	Persentase Jumlah Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Air Hangat Barat
2	Menciptakan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	Kantor Kepala Desa yang Aktif	Kecamatan Air Hangat Barat

**Lampiran XXXII Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN DEPATI TUJUH**
- 2 Tugas : Kecamatan Depati Tujuh melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.
- 3 Fungsi :
 1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
 2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
 3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Pelayanan Terhadap Masyarakat	Persentase Jumlah Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Depati Tujuh
2	Menciptakan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	Kantor Kepala Desa yang Aktif	Kecamatan Depati Tujuh

**Lampiran XXXIII Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN SITINJAU LAUT**
- 2 Tugas : Kecamatan Sitinjau Laut melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.
- 3 Fungsi :
 1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
 2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
 3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Jumlah Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Sitinjau Laut
2	Menciptakan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	Kantor Kepala Desa yang Aktif	Kecamatan Sitinjau Laut

Lampiran XXXIV Keputusan Bupati

Nomor : 050/KEP.544/2014

Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN DANAU KERINCI**
- 2 Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 3 Fungsi :
 1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
 2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
 3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Jumlah produk PATEN yang dikeluarkan	
2	Terwujudnya kompetensi aparatur pemerintah yang yang mengara pada profesionalisme	Jumlah buku-buku administrasi kecamatan yang diisi dengan baik	Kecamatan Danau Kerinci
		Jumlah laporan rutin yang dibuat	Kecamatan Danau Kerinci
3	Terlaksananya pengendalian program-program pemberdayaan masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	Kecamatan Danau Kerinci
4	Terlaksananya pengendalian pembinaan kemasyarakatan	Jumlah desa dilakukan sosialisasi dan pembinaan	Kecamatan Danau Kerinci
5	Terlaksananya pengendalian program pengentasan kemiskinan	Jumlah KK yang dibantu	Kecamatan Danau Kerinci
6	Terlaksananya peningkatan pendapatan masyarakat dalam bidang periwisata	Jumlah lembaga/kelompok ekonomi desa yang terbina	Kecamatan Danau Kerinci
7	Terlaksananya peningkatan pendapatan masyarakat dalam bidang perikanan	Jumlah lembaga/kelompok perikanan desa yang terbina	Kecamatan Danau Kerinci
8	Terlaksananya pembangunan yang didukaung dengan perencanaan yang tepat dan terukur	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapat pembinaan	Kecamatan Danau Kerinci
		Jumlah desa yang administrasinyaterbaik	Kecamatan Danau Kerinci
		Jumlah desa dengan administrasi kependudukan terbaik	Kecamatan Danau Kerinci

Lampiran XXXV Keputusan Bupati**Nomor : 050/KEP.544/2014****Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN KELILING DANAU**
- 2 Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 3 Fungsi :
1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi Terhadap Masyarakat	Persentase Jumlah Pelayanan Sesuai Standar	Renstra Kecamatan
2	Menciptakan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	Kantor Kepala Desa yang Aktif	Renstra Kecamatan

**Lampiran XXXVIII Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN BATANG MERANGIN**
- 2 Tugas : Kecamatan Batang Merangin melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.
- 3 Fungsi :
 1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
 2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
 3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Jumlah Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Batang Merangin
2	Menciptakan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	Kantor Kepala Desa yang Aktif	Kecamatan Batang Merangin

Lampiran XXXVII Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN BUKIT KERMAN**
- 2 Tugas : Kecamatan Bukit Kerman melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.
- 3 Fungsi :
 1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
 2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
 3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi Terhadap Desa	Persentase Jumlah Pelayanan Sesuai Standar	Kecamatan Bukit Kerman
2	Menciptakan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi	Kantor Kepala Desa yang Aktif	Kecamatan Bukit Kerman

**Lampiran XXXVI Keputusan Bupati
 Nomor : 050/KEP.544/2014
 Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **KECAMATAN GUNUNG RAYA**
 2 Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
 3 Fungsi :
 1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
 2 Pelaksanaan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan; dan
 3 Pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Persentase Jumlah Pelayanan Sesuai dengan Standar	Renstra Kecamatan
2	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Desa	Kantor Kepala Desa Aktif	Renstra Kecamatan

Lampiran XLIII Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014

- 1 Nama Organisasi : **DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN**
- 2 Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura daerah.
- 3 Fungsi :
 1 Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 2 Pemberian rekomendasi teknis perizinan di bidang pertanian;
 3 Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 4 Pelaksanaan bimbingan usaha tani; dan
 5 Penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan latihan penerapan teknologi pertanian dan tanaman pangan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pertanian	PAD Sektor Pertanian	Buku Laporan PAD
2	Peningkatan Produksi/Produktivitas padi Jagung dan kedele(PAJALE)	Produktivitas Padi Produktivitas jagung Produktivitas kedele	Buku Database
3	Peningkatan produksi/produktivitas bawang merah, kentang, jeruk dan cabe	Produktivitas Bawang Merah Produktivitas Kentang Produktivitas Jeruk Produktivitas Cabe	Buku Database
4	Tersedianya sarana dan prasarana untuk pembangunan sektor pertanian	Jalan Pertanian Irigasi Tersier Alsintan	Laporan Akhir dan Evaluasi
5	Terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang mempunyai kemampuan menerima, memanfaatkan dan mengembangkan IPTEK	Cakupan Bina teknologi kelompok tani	Laporan Akhir dan Evaluasi

- 1 Nama Organisasi : **DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**
 2 Tugas : Melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang peternakan dan perikanan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.
 3 Fungsi :
 1 Perumusan kebijakan teknis dinas peternakan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugas;
 2 pemberian rekomendasi teknis perizinan dan pelayanan umum;
 3 Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dalam lingkup dinas peternakan dan perikanan; dan
 4 Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah sesuai bidang lingkup dinas peternakan dan perikanan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Peningkatan produksi ternak dan Ikan	Produksi Daging Produksi Telur Produksi Ikan	DISNAKKAN
2	Peningkatan PAD (Pendapatan asli Daerah)	Penjualan benih ikan BBI Lokal Rumah potong hewan Pasar ternak	

**Lampiran XLV Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KAB. KERINCI**
- 2 Tugas : Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
- 3 Fungsi :
- 1 Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaku utama dan bpelaku usaha
 - 2 Pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
 - 3 Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - 4 Pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
 - 5 Pelaksanaan penumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utam dan pelaku usaha
 - 6 Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
 - 7 Pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian bidang penyuluh
 - 8 Pelaksanaan Tugas lain yangdiberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Meningkatkan kapasitas penyuluh dan kelembagaan	Jumlah penyuluh aparatur yang dilatih Jumlah penyuluh non aparatur yang dilatih	BP4K
2	Meningkatkan kapasitas pelaku utama, pelaku usaha dan kelembagaannya	Jumlah pelaku utamayang dilatih Jumlah pelaku usaha yang dilatih	BP4K
3	meningkatnya kapasitas informasi dan teknologi	Jumlah kaji terap teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan Jumlah percontohan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan Jumlah program penyuluh	BP4K

- 1 Nama Organisasi : **DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**
 2 Tugas : Melaksanakan Urusan Kehutanan dan perkebunan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
 3 Fungsi :
 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
 2 Penyelenggaraan urusan kehutanan dan perkebunan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 3 Pembinaan dibidang kehutanan dan perkebunan.
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Terkelolanya kawasan hutan secara efisien dan berkesinambungan	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	Dishutbun Kab Kerinci
2	Tercapainya sasaran perbaikan tutupan lahan kritis didaerah aliran sungai dan bertambahnya luasan hutan rakyat	Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tersedianya hasil hutan dan perkebunan yang berkualitas den meningkatnya hasil pemasaran	Produksi tebu (ton) Produksi kopi (ton)	

**Lampiran XLVIII Keputusan Bupati
Nomor : 050/KEP.544/2014
Tanggal : 31 Desember 2014**

- 1 Nama Organisasi : **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM**
- 2 Tugas : Melaksanakan kewenangan daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumberdaya mineral.
- 3 Fungsi :
 1 Sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan dinas perindustrian, perdagangan dan energi sumberdaya mineral, perumusan kebijakan teknis dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai pengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2 Bimbingan teknis dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan bidang industri, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
 3 Mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengembangan;
 4 Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait dengan upaya pengembangan promosi dan informasi;
 5 Melaksanakan hubungan kerjasama dengan dinas terkait serta organisasi dan sosialisasi dunia usaha di wilayah kabupaten kerinci; dan
 6 Bimbingan dan pengendalian terhadap pelaku usaha dalam pelaksanaan urusan pendaftaran dan perizinan;
 7 Bimbingan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan dan ESDM
 8 Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas
- 4 Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Terwujudnya pertumbuhan IKM berbasis potensi sumber daya alam lokal sehingga meningkatkan PDRB disektor industri kabupaten kerinci	Cakupan bina IKM Jumlah IKM yang telah menggunakan teknologi	Bidang Pengembangan Industri
2	Meningkatnya iklim perdagangan yang kondusif serta pasar rakyat yang nyaman	Menaingkatnya kesadaran pelaku usaha untuk mentera ulang alat UTTP Jumlah pasar rakyat yang telah di revitalisasikan	Bidang Pengembangan Perdagangan
3	Terlaksananya pendataan dan penataan tempat serta penerbitan SPT pedagang pasar rakyat dan terlaksananya pelayanan dan pembinaan pedagang	Cakupan bina kelompok pedagang Meningkatnya penerbitan SPT Pasar Rakyat	Bidang Pengembangan Pasar

- 1** Nama Organisasi : **RSUD MAYJEN H.A THALIB KABUPATEN KERINCI**
- 2** Tugas : Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3** Fungsi :
 1. pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah daerah dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan
 2. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan pada RSUD
 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan pada RSUD
 4. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan
 5. penyelenggaraan pelayanan rujukan
 6. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan profesional pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD
 7. penyelenggaraan rekam medis
 8. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
 9. pengelolaan administrasi dan keuangan
 10. pelayanan kesehatan kepada masyarakat
- 4** Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten kerinci dan sekitarnya	Terlaksanannya peningkatan pelayanan RS Meningkatnya kepuasan pelanggan RS	RSU Mayjen H.A Thalib Kab. Kerinci
2	Penyediaan pendukung peningkatan pelayana RS	Kelancaran pelayanan RS Neningkatnya kepuasan pelanggan RS	
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana RS	Penambahan peralatan kedokteran RS	
4	Terlaksananya proses bimbingan persiapan akreditasi rumah sakit	Bimbingan akreditasi terkait pencegahan dan pengendalian infeksi, bantuan hidup dasar (BHD), standar keselamatan pasien (SKP), standar manajemen pengelolaan obat (MPO), Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)	